ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI RIAU

Oleh :
Rahmita Handayani
Pembimbing : Hainim Kadir dan Taryono

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: r.mtha26@gmail.com

Analysis Of Government Expenditure On Education And Health Sectors To Human Development Index In The Riau Province

ABSTRACT

This study analyzes the development of Government Expenditure on Education and Health Sectors in Riau Province at period 2003-2012 and its effect to the Human Development Index (HDI). The analytical method used was descriptive quantitative by using Multiple Linear Regression Analysis, with secondary data published by BPS and other related organizations. The result shown the Government Expenditure on education and health sectors simultaneously affect the HDI. Government expenditure on education sector of Riau Province has a positive effect but not significant to HDI in the Riau Province. Government expenditure education sector in the whole district of Riau province has a positive and significant effect to HDI in the Riau Province. Government expenditure on health sector of Riau province has a positive and significant effect to HDI in the Riau Province. Government expenditure on health sector in the whole district of Riau province has a negative effect and insignificant to HDI in the Riau Province.

Keywords : Human Development Index (HDI), Goverment Expenditure, Education and Health.

PENDAHULUAN

Kebijakan strategis pembangunan menempatkan sumberdaya manusia sebagai perspektif pembangunan. Hal ini sesuai dengan strategi pembangunan nasional dengan menetapkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan sumber daya manusia (BPS, 2009). Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. (Mirza, 2012)

Provinsi Riau telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Bukan

hanya karena letak geografisnya yang berada di jalur lintas pulau Sumatera, namun juga angka pertumbuhan ekonominya yang selalu meningkat setap tahunnya. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi itu juga diikuti dengan tingginya kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Hal itu dapat terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk Riau setiap tahunnya dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. Bahkan IPM Riau berada di peringkat 3 Nasional setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Utara.

IPM Riau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 IPM Riau telah mengalami peningkatan sebesar 3,06 poin dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,45 poin pertahun. Pada tahun 2013 IPM Riau kembali meningkat sebesar 0,35 poin menjadi 77,25 poin. Hal yang menarik adalah bahwa besar peningkatan IPM setiap tahunnya di Provinsi Riau cenderung menurun. Dan pada tahun 2013 peringkat IPM Riau secara nasional juga menurun menjadi peringkat 5 disusul oleh Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Timur.

Agar dapat melaksanakan tugas pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah harus mempunyai keuangannya sendiri. Dengan adanya alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat.

Melihat kepada alokasi pengeluaran Pemerintah di Provinsi Riau untuk pembangunan daerah, pendidikan dan kesehatan masih belum menjadi fokus utama pembangunan. Pada tahun 2011 APBD Riau untuk Pendidikan turun menjadi 758.781 Juta Rupiah dari tahun 2010 yang sebesar 820.141 Juta Rupiah. Tahun 2012 APBD Riau kembali meningkat menjadi 803.250 Juta Rupiah. Untuk kesehatan, didalam APBD Riau tahun 2010 sebesar 272.150 Juta Rupiah. Tahun 2011 meningkat menjadi 296.352 Juta Rupiah dan tahun 2012 meningkat lagi menjadi sebesar 418.376 Juta Rupiah. Sedangkan total APBD Riau pada tahun 2010 sebesar 4.124.904 Juta Rupiah pada tahun 2011 sebesar 4.790.200 Juta Rupiah dan pada tahun 2012 sebesar 6.366.656 Juta Rupiah.

Anggaran untuk pendidikan pada tahun 2011 hanya sebesar 15,8 persen dan pada tahun 2012 sebesar 12,6 persen. Anggaran untuk kesehatan pada tahun 2011 sebesar 6,2 persen dan pada tahun 2012 sebesar 6,6 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan keinginan untuk peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Data tersebut menerangkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah pada APBD setiap tahunnya di bidang pendidikan dan kesehatan masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan keinginan untuk peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Dengan melihat latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran Pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2009).

Investasi pemerintah untuk pembangunan manusia, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan ataupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan anggota masyarakat. Dengan demikian, semakin besar investasi pembangunan manusia akan berdampak pada semakin tinggi produktivitas dan pendapatan individual, regional dan nasional serta merupakan aspek pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (Widodo, 2011).

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Diharapkan investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif (Usmaliadanti, 2011).

Akumulasi pengeluaran pemerintah pada belanja pembangunan, merupakan investasi sekaligus campur tangan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia (Meylina, 2013).

Pada dasarnya HDI (*Human Development Index*) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah satuan yang dikembangkan UNDP guna mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai "suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk" melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat

sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. IPM adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi yaitu:

1. Panjang usia (*longevity*), yang diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir.
2. Pengetahuan (*knowledge*), yang diukur berdasarkan angka melek huruf orang dewasa dan gabungan partisipasi sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi (dengan pembobotan yang sama pada kedua indikator).
3. Standar hidup (*standar of living*) suatu bangsa yang diukur oleh pendapatan riil per kapita.

Secara teknis ketiga dimensi ini dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu kesehatan (dan kependudukan), pendidikan, serta ekonomi. Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis (Bappeda, 2011).

Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu (BPS, 2013).

Todaro (2006) menerangkan tentang keterkaitan antara investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan dirangkum sebagai berikut:

a. Kesehatan dan pendidikan adalah investasi yang dibuat dalam individu yang sama
b. Modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan karena:
    1. Kesehatan adalah faktor penting atas kehadiran anak di sekolah
    2. Anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah dan dapat belajar secara lebih efisien
    3. Harapan hidup yang lebih lama akan meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan
    4. Individu yang sehat lebih mampu menggunakan pendidikan secara produktif di setiap waktu dalam kehidupannya
c. Modal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan karena:
    1. Banyak program kesehatan bergantung pada berbagai keterampilan yang dipelajari di sekolah (termasuk melek huruf dan angka)
    2. Sekolah mengajarkan pokok-pokok kesehatan pribadi dan sanitasi
    3. Dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan
d. Perbaikan efisiensi produktif dari investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan yang meningkatkan harapan hidup.

METODE PENELITIAN

Sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, Provinsi Riau memiliki pendapatan daerah yang besar. Namun, perhatian pemerintah dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masih belum menjadi fokus utama. Dan mengingat ketersediaan data, penelitian ini dilakukan di Ibukota Provinsi Riau.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series. Hubungan antarvariabel merupakan hubungan yang memiliki *lag time* dengan masing-masing variabel bebas memiliki tenggang waktu pengaruh sebesar satu tahun. Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan model analisis linear berganda.

Model ini menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Dengan variabel dependen adalah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau, dan variabel independen adalah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Riau, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan Provinsi Riau, dan Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

APBD merupakan kunci bagi pemerintah untuk menjalankan pembangunan di sebuah daerah, termasuk di Provinsi Riau. Oleh karenanya, besar APBD di setiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Di Provinsi Riau pertumbuhan APBD juga mengalami pergerakan yang berarti. Pada tahun 2003 APBD Provinsi Riau hanya sebesar 1,2 Triliun Rupiah, pada tahun 2006 APBD Provinsi Riau sebesar 3,1 Triliun Rupiah, pada tahun 2009 APBD Provinsi Riau sebesar 4 Triliun Rupiah dan pada tahun 2012 APBD Provinsi Riau meningkat menjadi 6,3 Triliun Rupiah.

a. Perkembangan Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental bagi sebuah negara. Pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara (BPS, 2013). Sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk membangun sektor pendidikan dapat terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Pada anggaran sektor pendidikan mulai pada tahun 2010 terjadi penurunan baik dari segi persentase maupun terhadap angka pengeluaran pemerintah sendiri. Dimana pada tahun 2010 alokasi sektor pendidikan sebesar 820 Milyar rupiah pada tahun 2011 menurun menjadi 758 Milyar dan pada tahun 2012 menjadi 803 Milyar Rupiah. Dengan persentase terhadap APBD pada tahun 2010 sebesar 19% pada tahun 2011 menjadi 15% dan pada tahun 2012 menjadi 12 %.

Berhasil atau tidaknya suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Pentingnya

peranan pendidikan sudah disadari oleh seluruh masyarakat di Riau, hal ini terlihat dari tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA setiap tahun yang selalu mengalami peningkatan.

APK untuk tingkat SD pada tahun 2012 sebesar 112,27 persen dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 112,38 persen. APK untuk tingkat SMP pada tahun 2012 sebesar 102,53 persen dan pada tahun 2013 sebesar 102,63 persen. APK untuk tingkat SMA pada tahun 2012 sebesar 78,71 persen dan pada tahun 2013 sebesar 78,78 persen.

APM untuk tingkat SD pada tahun 2012 sebesar 96,81 persen, tahun 2013 menjadi 97,14 persen. APM untuk tingkat SMP sebesar 94,92 persen, pada tahun 2013 menjadi sebesar 95,25 persen. APM untuk tingkat SMA pada tahun 2012 sebesar 68,69 persen, pada tahun 2013 sebesar 69,27 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang umur untuk umur 7-12 tahun 2009 sebesar 98,85 persen, tahun 2011 sebesar 98,60 persen, dan pada tahun 2013 sebesar 98,80. APS untuk jenjang umur 13-15 tahun untuk tahun 2009 sebesar 91,58 persen, tahun 2011 sebesar 91,80 persen, dan pada tahun 2013 sebesar 92,00 persen. APS untuk jenjang umur 16-18 tahun pada tahun 2009 sebesar 63,92 persen, pada tahun 2011 sebesar 64,00 persen, dan pada tahun 2013 sebesar 65,00 persen.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bagi semua masyarakat ditunjukkan dalam menyediakan fasilitas untuk pendidikan seperti sekolah. Pada tahun 2012/2013 terjadi peningkatan jumlah sekolah di Provinsi Riau dari 6649 sekolah menjadi 6.666 sekolah.

Jumlah guru mengalami penurunan dimana pada tahun 2011/2012 sebanyak 91.224 orang pada tahun 2012/2013 menjadi 76.472 orang. Jumlah siswa yang menjalani sekolah untuk tingkat TK, SD, SMP, dan SMA mengalami penurunan dimana pada tahun 2011/2012 sebanyak 1.289.787 orang pada tahun 2012/2013 menjadi sebanyak 1.203.595 orang.

b. Perkembangan Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya (BPS, 2013).

Anggaran sektor kesehatan memang selalu lebih kecil daripada sektor pendidikan, namun pengeluaran pemerintah atas kesehatan cenderung meningkat. Seperti pada tahun 2010 sebesar 272 Milyar rupiah meningkat pada tahun 2011 menjadi 296 Milyar Rupiah dan pada tahun 2012 menjadi 418 Milyar Rupiah. Dengan persentase terhadap APBD pada tahun 2010 sebesar 6,6 persen, pada tahun 2011 sebesar 6,2 persen dan pada tahun 2012 sebesar 6,6 persen.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah.

Jumlah fasilitas kesehatan seperti Rumah sakit, puskesmas, pustu, dan RS keliling semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terdapat 54 unit rumah sakit dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 59 unit rumah sakit. Demikian juga dengan jumlah pus-

kesmas pada tahun 2011 berjumlah 201 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 205 unit puskesmas. Namun jumlah pustu dan RS keliling mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 terdapat 836 unit pustu pada tahun 2012 menjadi 830 unit pustu. Dan RS keliling pada tahun 2011 berjumlah 207 unit pada tahun 2012 menjadi 204 unit.

Demikian juga dengan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin meningkat. Trend status gizi balita di Provinsi Riau, menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Pada tahun 2013 persentase balita yang mengalami gizi buruk 0,74 persen, 8,66 persen balita mengalami gizi kurang, dan 90,61 persen balita mengalami gizi cukup dan gizi lebih.

Perkembangan kesehatan Ibu dan Bayi dimana AKB, AKABA, dan AKI masih mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 7,9 pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 11,4 dan pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi 9,4. Angka kematian balita (AKABA) pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang drastis menjadi 13,6 menurun pada tahun 2010 menjadi 5,6 dan kembali meningkat pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 8,4 dan 9,7. Angka kematian ibu (AKI) sejak tahun 2010 menurun menjadi 109,9 meningkat pada tahun 2011 menjadi 122,1 dan kembali menurun pada tahun 2012 menjadi 112,7.

c. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau

Besarnya angka IPM Riau didukung oleh tingginya angka melek huruf dan besarnya angka pendapatan perkapita provinsi Riau. Pada tahun 2013 IPM Riau sebesar 77,25 poin dengan Angka Harapan hidup sebesar 71,73 tahun yang masih jauh dari nilai maksimum IPM sebesar 85 tahun, Angka Melek Huruf sudah mencapai angka 98,48 persen dengan kurang 1,52 persen lagi untuk mencapai angka 100 persen, rata-rata lama sekolah sebesar 8,78 tahun dimana angka ini masih dibawah misi pemerintah nasional untuk mencapai wajib belajar 9 tahun dan masih jauh dari standar UNDP sebesar 15 tahun, dan angka pengeluaran perkapita Provinsi Riau yang relatif lebih besar dari rata-rata pengeluaran perkapita provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebesar 657,26 ribu rupiah.

d. Analisis Regresi

Uji F

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai probabilitas (sig) adalah 0,000. Maka probabilitas (0,000) < (0,05) sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% secara bersama-sama pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Riau, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Provinsi Riau dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

Uji t

1. Pengujian terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai probabilitas (sig) adalah 0,371. Maka dengan demikian probabilitas (0,371) > (0,05) sehingga dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa pada taraf *level of significant* 95% Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Provinsi Riau berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

2. Pengujian terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai probabilitas (sig) adalah 0,018. Maka dengan demikian probabilitas (0,018) < (0,05) sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

3. Pengujian terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai probabilitas (sig) adalah 0,034. Maka dengan demikian probabilitas (0,034) < (0,05) sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan Provinsi Riau berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

4. Pengujian terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai probabilitas (sig) adalah 0,058. Maka dengan demikian probabilitas (0,058) < (0,05) sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,978. Hal ini berarti 97,8% nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Riau, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Provinsi Riau dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, sedangkan 2,2 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

e. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM di Provinsi Riau

1. Nilai konstanta = 71,272

Berarti jika semua variabel independen (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Riau, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Provinsi Riau dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan (ceteris paribus) maka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau pada 1 tahun yang akan datang menjadi sebesar 71,272 poin.

2. Variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Provinsi Riau

Dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus), maka pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan

Provinsi Riau berhubungan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Namun variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Provinsi Riau tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM Provinsi Riau.

Hasil penelitian Badrudin (2011) menunjukkan bahwa Variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan *time lag* 2 dan 3 tahun. Tetapi nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dua tahun sebelumnya menunjukkan pengaruh yang positif sementara nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tiga tahun sebelumnya menunjukkan pengaruh yang negatif.

3. Variabel Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau

Dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus), maka pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau berhubungan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Meylina (2013) yang menunjukkan bahwa Tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan maka akan diikuti oleh perubahan IPM.

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Riau

Dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus), maka pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Riau berhubungan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Badrudin (2011) yang menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY, namun nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dua tahun dan tiga tahun sebelumnya menunjukkan pengaruh yang positif meski dengan pengaruh yang tidak begitu besar.

5. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau

Dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus), maka pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau berhubungan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Namun variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM Provinsi Riau.

Sejalan dengan Hasil penelitian Rofiqi (2012) yang menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten Pulau Madura pada tahun 2002-2011. Hasil penelitian Meylina (2013) juga menunjukkan bahwa Pe-ngeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Riau dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan seluruh Kabupaten Kota memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Riau memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap IPM Provinsi Riau. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan seluruh kabupaten kota Provinsi Riau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Riau.
2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Provinsi Riau dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan seluruh Kabupaten Kota memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Provinsi Riau memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Riau. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap IPM Provinsi Riau.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kondisi pembangunan suatu daerah tidak lepas dari kondisi ekonomi masyarakatnya. Daerah Riau dengan ekonomi yang sedang berkembang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun dengan pendapatan yang tidak merata. Pemerintah baik pusat maupun daerah, diharapkan dapat terus meningkatkan Pengeluaran pemerintah terutama pada sektor publik dalam rangka penyediaan kapasitas dasar seperti Pendidikan (sekolah dan pelatihan, memastikan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, jaminan bagi tunjangan guru dan peningkatan SDM, jaminan sarana pendidikan dan perbaikan) dan Kesehatan (puskesmas dan jamkesmas) untuk masyarakatnya, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Provinsi Riau.
2. Dalam melaksanakan tugas pembangunan, pemerintah hendaknya bisa membuat prioritas pengeluaran pada hal-hal yang bisa meningkatkan IPM. Tidak hanya dalam kuantitas kegiatan dan sarana prasana namun juga dalam kualitas dan efektivitas kegiatan.
3. Investasi pada sektor Pendidikan dan Kesehatan hendaknya dapat lebih diarahkan kepada daerah-daerah terpencil atau pedalaman yang lebih membutuhkan perhatian dan bantuan serta akses yang belum memadai.
4. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerahnya tidak terlepas dari peran serta masyarakat di daerah tersebut untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas diri dalam peningkatan pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Badrudin, Rudy, 2011. Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, *BULETIN EKONOMI, Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1, April 2011: 23-30, ISSN: 1410-2293

BAPPEDA, 2011. *Analisis Statistik Perencanaan Pembangunan*, BAPPEDA Provinsi Riau, Pekanbaru

BPS, 2009. *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2008,* Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues

BPS, 2013. *Indeks Pembangunan Manusia 2012*, Badan Pusat Statistik

Meylina, Astri. 2013. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.1, No. 1, Maret 2013, ISSN: 2302 – 2663

Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, *Economics Development Analysis Journal*, 1 (2) (2012), ISSN 2252-6560

Rofiqi, A.N., Sutikno dan A. Wijanarko, 2012. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Seluruh Kabupaten Pulau Madura Tahun 2002-2011, *Jurnal FEB UA Surabaya*

Setiawan, M.B. & A. Hakim, 2013. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA, *Jurnal Economia,* Volume 9, Nomor 1, April 2013 : 18-26

Sukirno, Sadono, 2009. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar,* Edisi ketiga, Rajawali Pers, Jakarta

Todaro, M. P. dan S. C. Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi, Jilid I, Edisi ke Sembilan,* Erlangga, Jakarta

Usmaliadanti, Christina, 2011. *Skipsi* : Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang

Widodo, A., Waridin, dan Johanna M. K., 2011. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan,* Volume 1, Nomor 1 Juli 2011